



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TIGA STRATEGI UNTUK PENERAPAN EKONOMI BIRU

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event yang akan digelar di Belitung 7-8 September 2022 bertajuk "*The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap*". Ekonomi biru adalah ekonomi berbasis potensi laut. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan besarnya potensi ekonomi laut Indonesia yang jika dimanfaatkan secara maksimal akan berkontribusi signifikan bagi pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa, terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian. Untuk kesempatan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan tiga strategi dan rencana aksi Ekonomi Biru di bidang pengelolaan ruang laut, yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia; (2) pengelolaan sampah laut; dan (3) penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil guna melindungi sumber daya pesisir dan kerusakan akibat kegiatan ekonomi.

Terkait luasan kawasan, saat ini kawasan konservasi Indonesia 27.408.894,40 ha atau sekitar 21,79% dari luas wilayah Indonesia. Namun, luasan kawasan konservasi tersebut baru melindungi sekitar 3% atau sekitar 88 ha ekosistem mangrove Indonesia dan 34% atau sekitar 50 ribu ha padang lamun Indonesia. Kemudian, mengenai sampah laut, ada program Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) yang sudah diluncurkan KKP sejak 2002, yang dilanjut dengan program Bulan Cinta Laut, untuk mendorong dan memberdayakan para nelayan untuk terlibat melindungi dan menjaga laut dari pencemaran, termasuk sampah plastik. Program ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah sebanyak 30% melalui 3R dan penanganan sampah sebanyak 70% sampai tahun 2025, dan pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% sampai tahun 2025. Namun, LIPI memperkirakan masih ada 0,27-0,59 juta ton/tahun sampah plastik mencemari laut selama tahun 2018. Sementara itu, terkait penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, KKP melakukan penguatan regulasi perlindungan kawasan cagar karbon biru, pengalokasian ruang untuk memelihara/meningkatkan cadangan karbon biru, serta meningkatkan sinergi pengelolaan dan kualitas kawasan cadangan karbon biru. Beberapa peraturan tata ruang dan perizinan ditetapkan untuk memastikan bahwa ekosistem yang merupakan cagar karbon biru terlindungi dengan baik dan tidak dikonversi untuk penggunaan lain. Selain itu, sebanyak 15 lokasi telah ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk pengendalian lingkungan berupa cagar karbon biru dan menempatkan seluruh kawasan restorasi mangrove di bawah zona pengelolaan ekosistem pesisir. Juga 20 provinsi dalam proses mengintegrasikan kawasan pengelolaan pesisir ke dalam perencanaan tata ruang setempat.

Pemerintah Indonesia berkeyakinan ekonomi biru diperkirakan nilai tahunannya mencapai 2,5 triliun dollar AS dan secara progresif akan menarik investor, asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber kekayaan baru. Akan tetapi, mengelola ekonomi biru membutuhkan adanya kesamaan persepsi tentang karbon biru, termasuk kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat adat, akademisi, dan lainnya. Tantangan terbesar ekonomi biru adalah memanfaatkan laut secara lebih berkelanjutan.

Atensi DPR

Revolusi sistem ekonomi dan produksi pangan global memberi peluang besar diterapkan konsep revolusi ekonomi biru. Indonesia mempunyai potensi untuk menerapkan ekonomi biru untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19, terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian. UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengakomodir pengembangan ekonomi biru dan Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan ekonomi biru.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting, yaitu perluasan kawasan konservasi harus diikuti juga dengan upaya merehabilitasi kawasan mangrove dan padang lamun yang rusak, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah plastik di laut, dan meningkatkan pengintegrasian penataan ruang laut ke dalam perencanaan penataan ruang setiap wilayah atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setiap daerah. Penganggaran untuk berbagai upaya tersebut juga harus menjadi perhatian Komisi IV dalam pembahasan anggaran dengan mitra kerja guna mendukung pengimplementasian ekonomi biru.

Sumber

antaranews.com, 6 dan 7 September 2022;

Bisnis Indonesia, 7 September 2022;

Media Indonesia, 7 September 2022;

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018;

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022